

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM GERAKAN INDONESIA
SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)
DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

Dinda Ainurachma

NPP. 29.0348

Asdaf Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: dindainu20@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Child Identity Card (KIA) is one of the supporting documents in implementing the Indonesian Population Administration Awareness Movement Program (GISA). The issuance of KIA is an effort by the government to record the population from the time they were born until they are obliged to have an e-KTP. In addition, the existence of KIA for each child is used for school registration, tutoring and to protect children from the practice of child trafficking. **Purpose:** This research aims to find out and analyze the extent of public participation in the issuance of KIA and the inhibiting factors for community participation, and the efforts made by the Department of Population and Civil Registration of Bungo Regency. **Method** The research method used is the descriptive qualitative research method. Data was obtained through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is done by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions about what is obtained in the field. **Result:** Community participation in the GISA program in Bungo Regency has not been implemented properly, seen from the 5 factors of community participation according to Lowndes, Prachett and Stoker. **Conclusion:** Based on the research carried out, the researcher concludes that community participation in the GISA program for the issuance of KIA can be said to be still low or not in line with the government's expectations. It is shown by not all children in Bungo Regency who have KIA.

Keywords: Community Participation, GISA, Child Identity Card

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen pendukung dalam terlaksananya Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Penerbitan KIA ini sebagai upaya pemerintah untuk mendata penduduk sejak ia lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki KTP-el. Selain itu keberadaan KIA bagi setiap anak dimanfaatkan untuk pendaftaran sekolah, bimbingan belajar dan untuk melindungi anak dari praktek perdagangan anak. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penerbitan KIA dan apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terhadap apa yang diperoleh di lapangan. **Hasil:** Partisipasi masyarakat dalam proram GISA di Kabupaten Bungo belum terlaksana dengan baik, dilihat dari

5 faktor partisipasi masyarakat menurut Lowndes, Prachett dan Stoker. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program GISA terhadap penerbitan KIA dapat dikatakan masih rendah atau belum sesuai dengan harapan pemerintah, hal itu ditunjukkan oleh belum semuanya anak-anak di Kabupaten Bungo yang memiliki KIA.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, GISA, Kartu Identitas Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum yang pada hakikatnya memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas segala peristiwa kependudukan yang dialami warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar wilayah Indonesia. Dalam memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status hukum maupun status pribadi dari semua peristiwa yang dialami oleh penduduk, maka perlu dilakukan pengaturan yang berkaitan dengan status kependudukan yaitu administrasi kependudukan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) pada tahun 2018. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mengajak masyarakat supaya tahu dan memahami pentingnya kegiatan pengaturan dan pembuatan dokumen, sekaligus terciptanya lingkungan pemerintahan yang sadar betapa pentingnya administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan yang dilakukan pemerintah dimulai dengan melalui penertiban dokumen kependudukan yang merupakan pendaftaran dan pencatatan sipil. Adapun dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan lain sebagainya. Dokumen kependudukan KTP-el biasanya diperuntukan kepada penduduk yang telah berumur 17 tahun. Sedangkan untuk anak-anak yang belum mencapai usia 17 tahun tidak memiliki dokumen kependudukan selain akta kelahiran. Hal itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya program kependudukan terbaru oleh pemerintah yaitu penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program GISA dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), namun masih ada beberapa masalah yang dihadapi. Adapun masalah tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Masih banyak anak-anak di Kabupaten Bungo yang belum mempunyai KIA, hal itu disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat yang dalam hal ini adalah para orang tua

mengenai pentingnya KIA bagi anak mereka. Selain itu masyarakat juga terkendala dalam hal jarak tempuh yang harus dilalui untuk menuju ke tempat pelayanan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, terlebih lagi untuk masyarakat yang tinggal di desa-desa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Alfi Syahrin (2017) yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang*. Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berpengaruh pada faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang antara lain dari Kurang akurat data yang diperoleh, Gangguan Jaringan/Koneksi, serta Minimnya peralatan yang mendukung pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Penelitian kedua oleh Affiah Alriani (2018) yang berjudul *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam*. Hasil penelitian ini menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Kecamatan Lubuk Basung bisa dikatakan masih rendah banyak dari masyarakat yang enggan untuk mengurus akta kelahiran. Masyarakat juga terkendala pemenuhan syarat akta kelahiran. beberapa dari masyarakat menggunakan pihak ketiga dalam pengurusan akta kelahiran. Dan aspek-aspek penentu partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran ini adalah aspek pendidikan, ekonomi dan politik.

Penelitian ketiga oleh Kurniati, Andi Rasjid Pananrangi, Syamsul Bahri (2020) *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan E-KTP di Kecamatan Kepulauan Sangkarang Kota Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan Proses pengurusan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kepulauan Sangkarang Kota Makassar sudah cukup baik dan tidak ada kendala kecuali pendanaan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah komunikasi, sumber daya, sarana dan prasarana (persoalan terdapat pada jaringan listrik dan internet yang sering bermasalah) dan kondisi geografis. Untuk kondisi geografis daerah yang dibatasi oleh laut antara pulau sehingga untuk transportasi menggunakan perahu atau kapal yang sewaktu-waktu jika cuaca buruk dapat berbahaya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dalam penelitian ini partisipasi pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bungo, yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Alfi Syahrin, Affah Alriani dan Kurniati, Andi Rasjid Pananrangi dan Syamsul Bahri. Selain itu teori yang digunakan yakni Partisipasi model CLEAR oleh Lowndes, Prachett dan Stoker yang menyebutkan 5 faktor partisipasi masyarakat, yaitu: *Can do*, *Like to*, *Enable to*, *Asked to* dan *Responded to*.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) terhadap penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan dengan menghasilkan gambaran umum berkaitan masalah yang diteliti sebagai analisis terhadap fakta yang ada maupun pengamatan masalah terhadap masyarakat, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi sebagai pemecahan masalah pada masyarakat. Metode ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengkaji dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program GISA di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen maupun artikel. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Staf Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori Partisipasi model CLEAR oleh Lowndes, Prachett dan Stoker yang menyebutkan 5 faktor partisipasi masyarakat, yaitu: *Can do* (mampu), *Like to* (ingin), *Enable to* (dimungkinkan), *Asked to* (diminta) dan *Responded to* (menanggapi). Setelah memperoleh data yang dianggap valid oleh peneliti maka selanjutnya peneliti harus melakukan uji validitas terhadap data tersebut. Strategi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui partisipasi masyarakat dalam program GISA di Kabupaten Bungo dengan menggunakan teori Partisipasi model CLEAR oleh Lowndes, Prachett dan Stoker yang menyebutkan 5 faktor partisipasi masyarakat, yaitu: *Can do* (mampu), *Like to* (ingin), *Enable to* (dimungkinkan), *Asked to* (diminta) dan *Responded to* (menanggapi).

3.1 Can do (Mampu)

Pelaksanaan setiap kegiatan yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak tentu perlu adanya kemauan atau pihak tersebut harus mampu atau dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Baik dalam hal pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini harus ada kesiapan dari masyarakat untuk dapat menerima program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya semua dapat berjalan dengan terarah dan masyarakat juga dapat menyukseskan program GISA dengan baik. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua anak jika dilihat dari cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bungo masih rendah. Masih banyak masyarakat yang membuat Kartu Identitas Anak (KIA) dengan dasar untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu saja. Perlu adanya peningkatan dalam hal kualitas pelayanan, sebab dengan pelayanan yang prima akan membuat tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur tentang tinggi rendahnya partisipasi dalam pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo sehingga hal ini sangat penting dalam melihat tingkat partisipasi masyarakat yang dalam hal ini pada pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam terlaksananya setiap program pemerintah yang mana jika masyarakat tersebut memiliki pengetahuan yang luas serta kemampuan yang baik di bidang pendidikan maka masyarakat tersebut dapat lebih mudah menerima dan ikut serta dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

b. Keuangan

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, anggaran merupakan salah satu hal penting yang diperlukan. Baik dalam kelengkapan sarana dan prasarana maupun kebutuhan mendesak yang timbul sewaktu-waktu. Dengan adanya anggaran yang cukup sehingga setiap program pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

3.2 Like to (Ingin)

Pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu partisipasi dan kerja sama dari masyarakat maka harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Pemerintah harus bisa membuat masyarakat percaya terhadap program yang ada, sebab program tersebut sangatlah penting bagi masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki koneksi dengan petugas dari instansi pelaksana. Koneksi yang dimaksud adalah kenalan atau orang yang dapat mereka percaya sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah setempat khususnya instansi terkait. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mayakinkan masyarakat setempat tentang program yang mereka jalankan.

Rasa percaya merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk membangun suatu hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan pemerintah maupun masyarakat dan masyarakat. Lebih khusus dalam hal ini adalah hubungan antara instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dan masyarakat Kabupaten Bungo. Jika masyarakat percaya tentang pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) maka instansi terkait tidak akan susah payah untuk mencari perhatian serta kerjasama dari masyarakat karena masyarakat akan berpartisipasi dengan sendirinya. Dapat disimpulkan bahwa dari masyarakat Kabupaten Bungo itu sendiri, kesadaran mereka akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat dibidang masih kurang dengan ketidaksiapan mereka dalam merespon program pemerintah yang disebabkan karena tidak adanya rasa percaya dari masyarakat terhadap pemerintah setempat.

3.3 Enable to (dimungkinkan)

Enable to merupakan keterbukaan akses dengan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi. Pemerintah dalam memungkinkan setiap program dapat terlaksana, pemerintah harus lebih dulu mengerti dan paham tentang lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan program, pemerintah harus sudah punya antisipasi kedepan apakah cara yang digunakan sudah mampu membuat masyarakat ikut berpartisipasi dan memungkinkan masyarakat tersebut memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengikuti program pemerintah sehingga tidak akan terjadi masalah atau kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah yang mana hal tersebut dapat memungkinkan masyarakat tidak sama sekali mengikuti program pemerintah maupun instansi terkait.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi. Hasil penelitian dilapangan peneliti dapat melihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo memberikan sosialisasi tentang pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga kemudahan bagi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu hanya dengan membawa fotocopy Akte Kelahiran, fotocopy KK, fotocopy KTP Orang Tua dan Pas Foto 3x4=2 Lembar.

a. Kesempatan atau Peluang

Secara umum pemerintah sudah memberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo sudah memberikan banyak kesempatan dan peluang agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan memberikan kemudahan yaitu melalui program jemput bola ke desa-desa dan penerbitan langsung Kartu Identitas Anak (KIA) jika ingin membuat Akta Kelahiran.

b. Fasilitas

Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila didukung dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas sangat dibutuhkan oleh para pelaksana program untuk mencapai tujuan

dan sasaran dari program tersebut. Pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo membutuhkan sarana dan prasarana dalam bentuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), database, jaringan internet, serta perangkat penunjang.

Berikut adalah sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA):

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana Pendukung Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo

No	Perangkat	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	4	Cukup baik
2	Printer KIA	2	Cukup baik
3	Film	30	4 rusak
4	Ribbon	40	5 rusak
5	Blanko KIA	40.000	50 rusak

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dari sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Hasil dari pengamatan peneliti memang sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum mendukung dan terpenuhi. Dengan keterbatasan yang ada dan memanfaatkan fasilitas yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tetap melaksanakan pelayanan dan program-program dari dinas.

c. Umpan Balik

Keberhasilan dalam sebuah program yang telah dilaksanakan adalah adanya respon balik dari objek yang menerima program tersebut. Dalam hal ini program pemerintah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo telah melakukan sosialisasi dan jemput bola ke beberapa desa dan sekolah-sekolah. Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Bungo dalam Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) masih terbilang rendah. Hal itu dikarena masih belum semua masyarakat yang merespon program tersebut.

3.4 Asked to (diminta)

Asked to beranggapan bahwa orang-orang cenderung untuk terlibat ketika mereka diminta untuk terlibat. Untuk memastikan masyarakat berpartisipasi dalam program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) harus ada dorongan atau ajakan karena masyarakat seringkali menunggu disuruh baru masyarakat mengikuti program tersebut ataupun harus ada imbalan untuk berpartisipasi. Pemerintah harus bisa melakukan pendekatan dengan cara dan kemampuan yang pemerintah miliki. Keterlibatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengajak masyarakat sudah sangat maksimal tapi walaupun demikian masih banyak yang masih acuh tak acuh dan kurang antusias dalam menanggapi program yang dijalankan oleh pemerintah.

3.5 Responded to (menanggapi)

Responded to beranggapan bahwa orang-orang akan berpartisipasi secara berkelanjutan apabila mereka percaya bahwa keterlibatan mereka membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti melihat bahwa masyarakat Kabupaten Bungo dalam menanggapi dan melanjutkan setiap program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dengan sepenuh hati dan masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi. Untuk berpartisipasi saja masih kurang apalagi dalam hal melakukan partisipasi secara berkelanjutan. Hal itu bisa disebabkan karena faktor jarak tempuh yang jauh, transportasi tidak memadai serta jaringan yang kurang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi namun dari masyarakat sendiri memang masih belum mau untuk berpartisipasi pada program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) karena menilai kartu tersebut belum terlalu dibutuhkan serta enggan meluangkan waktu untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

3.6 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang bagi suatu instansi dalam menjalankan kegiatannya, terutama dalam bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait kelengkapan administrasi kependudukan. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki lengkap dan dalam kondisi baik maka kegiatan pelayanan akan lebih maksimal dan masyarakat merasa lebih puas serta dapat terlayani dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo sudah baik dan perlu adanya penambahan fasilitas lainnya agar

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal dan masyarakat merasa terlayani dengan puas sesuai kebutuhannya masing-masing.

b. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak mereka juga sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya target pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang enggan mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) karena menganggap kartu tersebut tidak terlalu digunakan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) karena beranggapan bahwa kartu tersebut tidak terlalu digunakan. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini misalnya dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya Kartu Identitas (KIA) melalui kegiatan sosialisasi.

c. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Kurang

Dalam melakukan pelayanan publik, instansi pemerintah haruslah mempunyai aparatur yang profesional yaitu aparatur yang bekerja sesuai bidangnya. Kemampuan pegawai sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing, walaupun ada sebagian pegawai yang ditempatkan bukan dibidangnya, ini semua agar pegawai tersebut memiliki keterampilan dan ilmu untuk bekerja diluar bidangnya, ini semua agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik, agar terwujudnya pelayanan yang lebih baik alangkah baiknya penempatan pegawai harus sesuai dengan bidangnya masing-masing, supaya masyarakat merasa nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.

3.7 Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa upaya tersebut antara lain:

a. Penambahan Fasilitas

Fasilitas pelayanan yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo bisa di bilang sudah cukup. Namun masih perlu adanya penambahan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menunjang kegiatan pelayanan untuk menjadi lebih maksimal, agar masyarakat merasa terlayani dengan baik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dengan kelengkapan fasilitas.

b. Kerjasama Organisasi

Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA), pihak dinas melakukan kerjasama dengan kelurahan, diantaranya dengan cara melakukan sosialisasi di setiap

kelurahan, kegiatan kemasyarakatan, maupun kegiatan keagamaan dan juga melakukan kegiatan pelayanan keliling ke setiap kelurahan. Selain bekerja sama dengan kelurahan, pihak Dinas juga bekerjasama dengan beberapa sekolah TK, SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bungo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat Kartu Identitas Anak serta dokumen kependudukan lainnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan kepada kelurahan dan diteruskan kepada masyarakat melalui kegiatan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan, maupun kegiatan keagamaan dengan cara melakukan himbauan disetiap kegiatan yang dilakukan tersebut dan diharapkan masyarakat bisa memahami apa yang disampaikan.

c. Dukungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dilakukan upaya antar instansi dan organisasi, namun perlunya dukungan masyarakat, karena dalam menjalankan suatu program harus dilibatkan dukungan masyarakat agar kegiatan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam pelayanan kependudukan pihak dinas mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat dalam setiap kegiatan kependudukan, upaya yang kami lakukan adalah mengkolaborasikan peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mensosialisasikan juga menghimbau masyarakat yang sudah tertib administrasi untuk mempengaruhi masyarakat disekelilingnya agar terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mengajak masyarakat supaya tahu dan memahami pentingnya kegiatan pengaturan dan pembuatan dokumen, sekaligus terciptanya lingkungan pemerintahan yang sadar betapa pentingnya administrasi kependudukan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Bungo yang belum memiliki dokumen kependudukan yang dalam hal ini adalah Kartu Identitas Anak (KIA). Hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu terdapat hal lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan KIA diantaranya ada beberapa kecamatan yang jaraknya cukup jauh untuk sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, kurangnya sosialisasi dari pihak dinas yang disebabkan oleh dibatasi kegiatan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai KIA. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bungo melakukan kegiatan jemput bola yang dilakukan setiap Sabtu-Minggu ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari kantor Disdukcapil agar masyarakat dapat tetap mengurus dokumen kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) terhadap Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dapat dikatakan masih rendah atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Masih rendahnya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh belum semuanya anak-anak di Kabupaten Bungo mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) faktor partisipasi yaitu *can do* (mampu), *like to* (ingin), *enabled to* (dimungkinkan), *asked to* (diminta) dan *responded to* (menanggapi) yang dilakukan pemerintah kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Beberapa faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat yaitu keterbatasan fasilitas dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo masih kurang. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo diantaranya menambah beberapa fasilitas kerja, melakukan kerjasama organisasi dengan desa/kelurahan dan beberapa sekolah dan meminta dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Lowndes, Prachett dan Stoker mengenai elemen permasalahan partisipasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program GISA terhadap pembuatan KIA di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*. Bandung: PT. Alumni.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sastropoetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemartono, T., Hendrastuti, S. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Sugiarso, Eko. 2015. *Memahami Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Alriani, Afifah. 2018. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam
- Kurniati, Andi Rasjid Pananrangi, Syamsul Bahri. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan E-KTP di Kecamatan Kepulauan Sangkarang Kota Makassar
- Syahrin, Alfi. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- <https://www.kompasiana.com>
- <https://jambi.tribunnews.com>
- <https://id.wikipedia.org>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo